

INDOKTRINASI PENDIDIKAN PADA MASA ORDE LAMA: MENANAMKAN NILAI PANCASILA DAN MANIPOL/USDEK

Yona Venelia Hutabarat ^{*1}

Universitas Negeri Medan, Indonesia
yona.veneliahtb@gmail.com

Daniel Parlindungan Sijabat

Universitas Negeri Medan, Indonesia
danielzzparlindungan@gmail.com

Rica Kharoma Andini

Universitas Negeri Medan, Indonesia
ricakharomaandini260903@gmail.com

Abstract

Indoctrination is a term that refers to the act of instilling certain doctrines or beliefs into the mind of a person or group. During the old order in Indonesia, indoctrination was carried out in all fields including education which was specifically used to instill values and beliefs in the country's philosophy, namely Pancasila. In emphasizing indoctrination, the education system specifically followed the decree issued by the president regarding the cultivation of Pancasila values. This can be seen with the birth of civic education subjects as a support, even the education system in the colonial era was also replaced in order to achieve a social life that fully loves the country.

Keywords: Education; Old Order; Soekarno; Indoctrination; Curriculum.

Abstrak

Indoktrinasi merupakan sebuah istilah yang mengacu pada tindakan penanaman doktrin atau kepercayaan tertentu kedalam pemikiran seseorang atau kelompok. Selama berlangsungnya orde lama di Indonesia, indoktrinasi dilakukan dalam segala bidang termasuk pendidikan yang secara khusus digunakan untuk menanamkan nilai-nilai dan keyakinan terhadap falsafah negara, yaitu pancasila. Dalam penekanan indoktrinasi, sistem pendidikan secara khusus mengikuti dekrit yang dikeluarkan presiden mengenai penanaman nilai-nilai pancasila. Hal

Kata Kunci : Pendidikan; Orde lama; Soekarno; Indoktrinasi; Kurikulum

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia telah berkembang sejak lahirnya politik etis pada masa pendudukan Belanda. Politik etis sendiri telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, saat itu Indonesia masih dijuluki dengan nama Hindia Belanda. Berkat adanya politik etis, kaum-kaum terpelajar yang berpendidikan mulai bermunculan di Indonesia dan membawa arus perubahan yang cukup signifikan terhadap perkembangan bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaannya. Namun sebelum kemerdekaan, pendidikan di masa Hindia Belanda bukanlah sebuah hal yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, adanya stratifikasi kelas sosial dan keturunan tentu saja

¹ Korespondensi Penulis

menjadi faktor utama dari ketidakmerataan pendidikan. Hal ini cukup menunjukkan secara jelas bahwa sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, semua aspek kehidupan bangsa dikendalikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya memasuki sebuah babak baru dalam kehidupan bernegara dan sistem kenegaraan. Berbagai aspek baru dalam berbagai bidang disusun dengan rapi untuk mencapai sebuah keselarasan bagi seluruh rakyat Indonesia yang baru saja merdeka, tak terkecuali dengan bidang pendidikan.

Pendidikan menjadi salah satu pilar penting yang mempengaruhi maju atau tidaknya suatu negara dimasa yang akan datang. Pendidikan dapat menjadi penentu dari pembentukan karakter dan identitas suatu bangsa, dimana pendidikan dapat menjadi alat untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu kepada generasi muda sehingga mereka dapat menjadi individual yang memiliki sifat positif dan cinta kepada tanah air. Dalam buku landasan pendidikan tahun 2011, dijelaskan bahwa pendidikan memiliki pengertian mengenai usaha mempengaruhi, melindungi serta memberikan bantuan yang bertujuan memberikan kedewasaan anak didiknya, atau dengan kata lain membantu anak didik agar cukup mampu dalam melaksanakan tugasnya tanpa bantuan orang lain (Suriansyah, 2011).

Pancasila yang hingga saat ini menjadi dasar dan falsafah negara menjadi landasan utama dari pendidikan di Indonesia. Walaupun Indonesia pasca kemerdekaan kerap mengalami perubahan sistem pemerintahan, kedudukan Pancasila sama sekali tidak goyang sebagai dasar negara. Pelaksanaan pendidikan yang berlangsung di Indonesia masa orde lama tidak jauh dari campur tangan politik dan pemerintah, dimana kebijakan pendidikan yang dikembangkan berfokus pada pengaturan pendidikan nasional.

Salah satu bentuk aspek negatif dari sebuah pendidikan adalah indoktrinasi, yaitu sebuah proses penanaman nilai tertentu kepada sebuah kelompok atau organisasi. Dimana dalam konteks pendidikan, indoktrinasi merujuk pada sebuah upaya untuk mengajarkan dan mempengaruhi siswa dengan nilai-nilai, ideologi, atau keyakinan tertentu tanpa memberikan sebuah ruang untuk kritik dan pemikiran yang berbeda (Rozak, 2022).

Di Indonesia sendiri, indoktrinasi pernah menjadi bagian dari sistem pendidikannya pada masa orde lama, yaitu pada periode 1945 – 1966. Dimana pada masa ini, pemerintah berusaha keras untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Manipol/USDEK (Manifestasi Politik, Undang-Undang dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, dan Ekonomi Terpimpin) pada rakyat diseluruh Indonesia melalui sistem pendidikan (Umasih, 2017). Tujuan dari dilakukannya indoktrinasi pendidikan ini sudah sangat jelas, yaitu untuk melahirkan rakyat Indonesia yang memiliki jiwa-jiwa Pancasila didalam dirinya, semangat nasionalisme yang tinggi, loyalitas terhadap pemerintah, dan memiliki kesediaan diri untuk berkorban demi pembangunan bangsa yang lebih baik kedepannya.

Untuk menciptakan rasa keterikatan terhadap tanah air yang kuat, maka pembelajaran sejarah dijadikan sebagai pemeran utama dalam indoktrinasi dalam pendidikan. Pelaksanaan dari pendidikan sejarah di Indonesia tentu saja tidak dapat lepas dari adanya kurikulum yang menjadi acuan dasar pembelajaran. Kurikulum sendiri merupakan produk pendidikan yang dipengaruhi oleh kebijakan politik dari pemerintah, dimana kurikulum pendidikan sejarah mengalami berbagai penyesuaian seiring dengan berputarnya politik saat itu.

Dilakukannya indoktrinasi tidak semata-mata hanya untuk membangun karakter bangsa. Pasca kemerdekaan Indonesia, keberlangsungan pendidikan masih dilaksanakan dengan mengadopsi sistem pendidikan Belanda dan Jepang. Dimana sumber buku pembelajaran yang dipakai masih menggunakan buku berbahasa Belanda yang diterjemahkan. Hal ini tentu saja memberikan banyak pengaruh besar pada mata pelajaran sejarah, bagaimana mungkin sejarah Indonesia disampaikan kepada peserta didik berdasarkan sumber buku berbahasa Belanda dengan sudut pandang dari orang Belanda, atau Eropasentris (Andriyani, 2023). Kemudian, di tahun 1950 Indonesia baru secara resmi memiliki undang-undang yang mengatur tentang pendidikan nasional.

Akan tetapi, indoktrinasi pendidikan pada orde lama ini cukup menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan pendidikan dan masyarakat luas di Indonesia. Ketika dilakukan indoktrinasi pendidikan ini, pengabaian terhadap keberagaman dan kekayaan budaya di Indonesia, dan menahan kreativitas dan inovasi dari semua bidang, terutama dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Cara indoktrinasi pendidikan pada masa orde lama akan beralur dimulai dari kurikulum pendidikan sejarah yang dapat diberikan kesesuaian dengan kepribadian politik pemerintah, pelaksanaan pedoman dan pengamatan Pancasila (P4). Dilakukannya indoktrinasi pendidikan meninggalkan banyak sekali dampak-dampak negatif, seperti ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dari sebagian rakyat Indonesia terhadap orang-orang dari lembaga pemerintah, yang akhirnya mampu memicu terjadinya gerakan-gerakan oposisi dan pemberontakan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut pengertiannya secara umum, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena secara detail dan mendalam, dengan menggunakan data yang bersifat non-numerik, seperti penggunaan teks, gambar, ataupun suara (Thabroni, 2022). Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah library research atau studi pustaka, yang dimana peneliti menggunakan data-data tertulis baik yang berasal dari buku, jurnal, website ataupun media tulis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indoktrinasi pendidikan pada masa orde lama

Indoktrinasi pendidikan adalah sebuah proses yang diberlakukan berdasarkan satuan sistem nilai untuk menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu. Praktik ini sering kali dibedakan dari pendidikan karena dalam tindakan ini, orang yang menerima indoktrinasi dimaksudkan untuk tidak memberikan pertanyaan atau secara kritis melakukan uji coba doktrin yang diberikan.

Latar belakang dari indoktrinasi pendidikan yang ada di Indonesia pada masa orde lama ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Manipol/USBEK pada rakyat Indonesia karena adanya kekhawatiran akan pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian. Proses indoktrinasi pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Manipol/USBEK dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti perubahan kurikulum, media massa, organisasi massa, serta lembaga-lembaga pemerintah (Afriansyah, 2021). Tujuan dari dilakukannya

indoktrinasi pendidikan dalam menanamkan nilai Pancasila dan Manipol/USBEK adalah untuk melahirkan rakyat Indonesia untuk memiliki individu berjiwa Pancasila dan semangat nasionalisme.

Indoktrinasi pada masa orde lama berputar melalui pelajaran sejarah, hal ini merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi pandangan dan sikap dari para pelajar terhadap pemerintahan yang berkuasa saat itu. Indoktrinasi ini dilakukan dengan menyajikan sejarah yang sesuai dengan ideologi dan kepentingan penguasa, dimana opini ini diarahkan pada pengabaian ataupun mengecilkan peran serta kontribusi pihak-pihak yang berseberangan dengan pihak penguasa. Salah satu contoh terhadap indoktrinasi pada masa orde lama melalui pelajaran kewarganegaraan yang lebih condong ke arah sosialisme.

Dimana pada masa itu, Presiden Soekarno mengusungkan sebuah konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunis) sebagai acuan dasar politik negara. Hal ini sangat memberikan dampak pada penggunaan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan nilai-nilai sosialisme, seperti persamaan hak, kesejahteraan rakyat, dan juga anti-imperialisme (Lingga, 2017). Selain itu, media massa memiliki peranan yang cukup penting dalam melakukan praktik indoktrinasi pada masa orde lama, yaitu digunakan sebagai alat propaganda untuk mendukung semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Soekarno, seperti Konfrontasi dengan Malaysia, Ganyang Malaysia, ataupun Trikora. Media massa juga sering digunakan sebagai alat penyampaian pidato-pidato Soekarno untuk menggugah semangat rakyat Indonesia.

a. Pendidikan pada masa orde lama

Pendidikan orde lama berlangsung pada periode 1945-1966, ketika Indonesia berada pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Pendidikan pada masa orde lama mengalami beberapa perubahan, baik dalam hal tujuan, kurikulum, ataupun organisasi (Hartono, 2016).

- 1) Pendidikan pada masa orde lama berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan dasar dan falsafah dari negara Indonesia.
- 2) Pendidikan pada masa orde lama dipengaruhi oleh ideologi NASAKOM yang dianut oleh Presiden Soekarno. Ideologi ini memberikan cerminan dari sikap politik Presiden Soekarno yang ingin menjalin hubungan kerjasama antara berbagai kelompok sosial dan politik di Indonesia.
- 3) Pada masa orde lama, kurikulum mengalami tiga kali perubahan, yaitu di tahun 1947, 1952, dan 1960. Kurikulum pada masa ini bertujuan untuk menetapkan sebuah tujuan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih maju dan jelas. Kurikulum pada masa ini mencakup materi-materi seperti Pancasila, Manipol/USDEK (Undang-undang dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kebudayaan Indonesia), dan juga Tubapi (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi).
- 4) Lembaga-lembaga pendidikan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno memiliki peranan sebagai penyebaran ideologi Nasakom, ataupun doktrin-doktrin Soekarno lainnya. Lembaga-lembaga pendidikan ini dapat berupa sekolah-sekolah formal, perguruan tinggi, dan lain sebagainya.

b. Kurikulum pada masa orde lama

Kurikulum pertama yang di pakai pada masa itu yaitu "rencana pelajaran 1947" atau yang lebih di kenal dalam bahasa Belanda leer plan. Rencana pelajaran 1947 baru dijalankan

pada tahun 1950. Kurikulum ini dibuat dua tahun setelah proklamasi kemerdekaan, ketika Indonesia pada masa itu masih menghadapi serangan agresi militer dari pihak Belanda dan Sekutu serta beberapa pemberontakan yang masih terjadi di daerah-daerah (Asri, 2017). Kurikulum pertama yang di pakai pada masa itu yaitu “rencana pelajaran 1947” atau yang lebih di kenal dalam bahasa Belanda *leer plan*. Pada susunan kurikulum ini hanya memiliki 2 hal pokok yaitu daftar mata pelajaran dan jam pelajaran, serta garis-garis besarnya. Kurikulum ini dilandaskan pada Pancasila yang menjadi asas pendidikan dan bertujuan untuk karakter dari para generasi muda Indonesia merdeka, berdaulat, dan dapat sejajar dengan bangsa lain di seluruh belahan dunia. Kurikulum ini tidak menekankan pada pola pendidikan pikiran, melainkan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan juga bermasyarakat. Rencana pelajaran 1947 ini merupakan perubahan besar dari arus pendidikan yang lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda kepada kepentingan nasional.

Kurikulum kedua yang menjadi pengganti dari “Rencana Pelajaran 1947” adalah kurikulum 1952, atau yang disebut juga sebagai Rencana Pelajaran 1952. Akan tetapi, kurikulum ini baru dapat dilaksanakan pada tahun 1954. Kurikulum ini muncul setelah Indonesia mengalami perubahan arus politik yang cukup besar, yaitu berakhirnya agresi militer Belanda dan Sekutu, serta munculnya pengakuan kedaulatan Indonesia dari pihak Belanda, dan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) (Palupi, 2018). Kurikulum ini mengadopsi beberapa prinsip dan konsep dari sistem pendidikan kurikulum yang berlaku di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda.

Pada perubahan kurikulum ketiga yang terjadi pada masa orde lama adalah kurikulum 1960. Kurikulum ini secara resmi dilaksanakan pada tahun 1962, dimana kurikulum ini dibuat setelah Indonesia mengalami banyak perubahan politik, yaitu pembentukan Demokrasi terpimpin dan Deklarasi Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Kurikulum ini juga memiliki kesamaan dengan kedua kurikulum sebelumnya, yaitu berlandaskan pada Pancasila sebagai asas pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme, berwatak demokratis, serta kepandaian hidup. Kurikulum ini juga secara khusus menekankan pada pendidikan nasionalisme, demokrasi, dan juga kewarganegaraan. Secara khusus, kurikulum 1960 disusun berdasarkan hasil kajian tentang keadaan pendidikan di Indonesia, serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari dunia (Kurnia & Hudaidah, 2021).

c. Pembelajaran nilai-nilai karakter

Manipol Presiden Soekarno setelah munculnya Dekrit Presiden 5 juli 1959 memiliki dampak pada pendidikan nasional. Dari Sisi Ideologi, dapat kita lihat bahwa Manipol diindoktrinasikan pada seluruh lapisan rakyat Indonesia pada semua jenjang pendidikan, sehingga tidak dibenar akan adanya penafsiran-penafsiran lain selain dari apa yang telah dirincikan oleh pemerintah (Wadirman, 1996). Adapun tujuan dari pendidikan nasional di fase ini, yaitu untuk melahirkan masyarakat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik pada bidang spiritual maupun material, dan memiliki jiwa pancasila yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Perikemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Kebangsaan; (4) Kerakyatan; serta (5) Keadilan sosial seperti yang dijelaskan dalam Manipol USDEK (Wadirman, 1996).

Konsep sosialisme pada masa ini memberikan pengertian bahwa pendidikan merupakan hak bagi semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Untuk menyesuaikan pendidikan dengan Manipol, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan pada masa itu menyusun rencana jangka pendek yang disebut Sapta Tama yang berisikan (1) Penerbitan aparatur dan usaha-usaha kementerian PP dan K; (2) Menggiatkan kesenian dan olahraga; (3) Menggiatkan “usaha halaman”; (4) Mengharuskan penabung; (5) Mewajibkan usaha-usaha koperasi; (6) Mengadakan kelas masyarakat; dan (7) Membentuk regu kerja di kalangan sekolah lanjutan atas dan universitas (H.A.R, 2003).

Sebagai langkah usaha untuk melaksanakan Sapta Usaha Tama, maka dibentuklah suatu urusan khusus yang disebut dengan urusan Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana. Pancawardhana mengusahakan berjalannya sistem pendidikan baru yang terdiri dari (1) Perkembangan kecerdasan; (2) Perkembangan Moral Nasional; (3) Perkembangan artistik emosional; (4) Pengembangan Skill; dan (5) Perkembangan Fisik (Hartono, 2017). Pancawardhana berimplikasi pada dunia pendidikan, dimana kurikulum harus diarahkan untuk mengembangkan kualitas yang dinyatakan dalam Pancawardhana dalam semangat Manipol-USDEK. Perubahan dari kurikulum yang sangat menonjol adalah dengan munculnya mata pelajaran Civics yang diarahkan untuk pembentukan kewarganegaraan yang bercirikan Manipol-USDEK (Hartono, 2017). Dalam hal ini juga, liberalisme dan individualisme menjadi musuh yang harus di musnahkan dalam pelajaran Civics karena sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat Manipol-USDEK.

Model pendidikan karakter bangsa di masa orde lama juga diperkuat dengan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama 1961-1969. Pada pasal 2 TAP MPRS/II/1960 ditetapkan strategi pembangunan bidang Mental/Agama/Kerohanian, yaitu untuk melaksanakan Manifesto Politik di lapangan pembinaan Mental/Agama/Kerohanian dan kebudayaan dalam menjamin syarat-syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan nasional Indonesia, serta dapat menolak pengaruh-pengaruh buruk budaya asing yang masuk ke Indonesia.

2. Dampak dari dilakukannya indoktrinasi

Indoktrinasi pendidikan pada masa orde lama adalah proses penanaman nilai-nilai pancasila dan Manipol/USDEK kepada rakyat Indonesia melalui sistem pendidikan nasional. Indoktrinasi ini dilakukan dengan tujuan melahirkan rakyat Indonesia yang memiliki jiwa pancasila dan semangat nasionalisme, serta mendukung kebijakan politik pemerintah pada masa itu (Fadli & Kumalasari, 2016).

Dampak dari indoktrinasi pendidikan pada masa orde lama dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

- a) Aspek politik: Indoktrinasi pendidikan dapat mempengaruhi orientasi politik rakyat Indonesia, khususnya generasi muda yang menjadi sasaran utama pendidikan. Indoktrinasi dapat membuat rakyat Indonesia cenderung condong ke arah sosialisme, yang merupakan ideologi yang dianut oleh pemerintah orde lama. Indoktrinasi juga dapat mengurangi kritisisme dan

oposisi terhadap pemerintah, karena rakyat Indonesia diharapkan taat dan setia kepada penguasa.

- b) Aspek sosial: Indoktrinasi pendidikan dapat mempengaruhi sikap sosial rakyat Indonesia, terutama dalam hal toleransi dan keragaman. Indoktrinasi dapat membuat rakyat Indonesia lebih menghargai persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindari konflik antar kelompok. Namun, indoktrinasi juga dapat menimbulkan diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dari norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti kelompok etnis, agama, atau ideologi
- c) Aspek budaya: Indoktrinasi pendidikan dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya rakyat Indonesia, terutama dalam hal identitas dan tradisi. Indoktrinasi dapat membuat rakyat Indonesia lebih bangga dengan budaya nasional, serta lebih mengenal sejarah dan perjuangan bangsa. Namun, indoktrinasi juga dapat mengabaikan atau mengecilkan peran budaya lokal atau daerah, yang merupakan bagian dari kekayaan dan keberagaman bangsa Indonesia.
- d) Aspek pendidikan: Indoktrinasi pendidikan dapat mempengaruhi kualitas dan relevansi pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal kurikulum dan metode pembelajaran. Indoktrinasi dapat membuat kurikulum pendidikan lebih menekankan pada materi-materi yang berkaitan dengan Pancasila dan Manipol/USDEK, serta mengabaikan atau mengurangi materi-materi lain yang penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indoktrinasi juga dapat membuat metode pembelajaran lebih bersifat dogmatis dan otoriter, serta menghambat kreativitas dan inovasi siswa.

3. Perbandingan antara indoktrinasi pendidikan pada masa orde lama dengan pendidikan pada masa kedudukan Belanda

a. Periode 1945-1950

Sistem persekolah sesudah Indonesia Merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk tiga tingkat pendidikan seperti pada masa Jepang tetap diteruskan. Sedangkan rencana pembelajaran pada umumnya sama dan Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai Bahasa pengantar untuk sekolah. Buku-buku Pelajaran yang digunakan adalah buku hasil terjemahan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia yang sudah dirintis sejak zaman Jepang. Adapun sistem pendidikan yang berlaku pada zaman orde lama adalah sebagai berikut (Ekajati et al., 1998):

- Pendidikan Rendah

Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan sekolah rakyat (SR) lama pendidikan selama 3 tahun menjadi 6 tahun. Tujuan pendirian SR adalah selain mengingatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan juga dapat menampung hasrat yang besar untuk bisa bersekolah.

- Pendidikan Guru

Dalam periode antara tahun 1945-1950 dikenal tiga jenis pendidikan guru (SGB, SGC, SGA) yaitu sebagai berikut (Gunawan, 1986):

- 1) Sekolah Guru B (SGB) lama pendidikan 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan SR yang akan lulus dalam ujian

masuk sekolah lanjutan. Pelajaran yang diberikan bersifat Umum untuk dikelas I, II, III, Sedangkan pendidikan kejuruan baru diberikan dikelas IV.

- 2) Sekolah Guru C (SGC) berhubung kebutuhan guru SR yang mendesak maka terasa perlunya pembukaan sekolah guru dalam tempo singkat dapat menghasilkan. Untuk kebutuhan tersebut didirikan sekolah guru dua tahun setelah SR dan dikenal dengan sebutan SGC.
- 3) Sekolah Guru A (SGA) Karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin pengetahuan untuk taraf pendidikan guru, maka dibuatlah SGA ini untuk memberi pendidikan 3 tahun Sesudah SMP. Disamping itu dapat diterima pelajar lulusan Kelas III SGB. Mata Pelajaran yang diberikan SGB hanya penyelenggaraanya lebih luas dan mendalam.

- Pendidikan Umum

Ada dua jenis pendidikan umum yaitu sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah Tinggi (SMT). Sekolah menengah Pertama (SMP) seperti halnya pada zaman jepang, SMP menggunakan rencana Pelajaran yang sama pula (Gunawan, 1986). Tetapi dengan keluarnya surat keputusan menteri PP dan K tahun 1946, maka diadakanya pembagian A dan B mulai kelas II, sehingga Terdapat kelas II A, IIB, IIIA, IIIB.

b. Pendidikan pada zaman Belanda

- Kebijakan sistem pendidikan pendidikan colonial pada masa wiliem rooseboom (1899-1904)

Willem Rooseboom adalah Gubernur Jenderal yang menyetujui dan meresmikan pusat kursus bahasa Belanda untuk memperluas penggunaan bahasa Belanda di kalangan Bumiputera dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan agar supaya masyarakat pribumi bisa lebih mudah memasuki pendidikan Barat yang pada akhirnya para lulusannya akan dipekerjakan dalam instansi pemerintahan Belanda.

- Kebijakan Sistem Pendidikan Kolonial Pada Masa Johannes Benedictus van Heutz (1904 – 1909)

Van Heutz berusaha untuk menyebarluaskan pendidikan dalam skala yang lebih luas yaitu mencari tipe sekolah lain yang lebih sederhana dan lebih murah. Van Heutz mendirikan sekolah yang cocok untuk Bumiputera yaitu Sekolah Desa (Volkschool). Menurut Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heutz itulah tipe sekolah yang dirasa paling cocok. Pertama, sekolah ini murah dan dapat didirikan berdasarkan gotong royong, tanpa pembiayaan sedikit pun dari pemerintah. Kedua, sekolah ini menjadi bagian integral dari masyarakat desa yang memandangnya sebagai miliknya. Ketiga, sekolah yang mempunyai kurikulum ini tidak akan mengasingkan anak dari kehidupan agraris di desanya (Kartodirjo, 1992).

- Kebijakan Sistem Pendidikan Kolonial Pada Masa Pemerintahan A.W.F Idenburg (1909 – 1916)

Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Idenburg mempunyai kebijakan yaitu ingin menyatukan sekolah yang pada awalnya lepas dan tidak berhubungan satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan yang bulat dan sistematis karena pada tahun

1910 mulai disadari bahwa tidak ada hubungan antar sekolah untuk anak pribumi. Untuk itu Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Idenburg mengirim surat kepada menteri jajahan tentang rencananya tersebut.

- Kebijakan Sistem Pendidikan Kolonial Pada Masa Pemerintahan Johan Paul van Limburg Stirum (1916 – 1921)

Pada masa pemerintahan Johan Paul van Limburg Stirum Volksraad (Dewan Rakyat) dibentuk dan Technische Hoogeschool te Bandoeng (cikal bakal Institut Teknologi Bandung) didirikan. Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum lebih mendorong kehidupan demokrasi di Hindia Belanda.

KESIMPULAN

Pasca kemerdekaan 1945, pemerintah Indonesia secara serius melakukan indoktrinasi terhadap rakyat Indonesia untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih cinta terhadap tanah air, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Indoktrinasi merupakan sebuah proses penanaman gagasan, nilai-nilai, sikap, ataupun sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan. Dalam bidang pendidikan sendiri, indoktrinasi dilakukan dengan penekanan filsafat pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, hal ini dilakukan agar adanya pemulihan sudut pandang dalam bidang pendidikan setelah bangsa Indonesia menerima sistem pendidikan dari era penjajahan Belanda dan Jepang, dimana fokus pembelajaran sejarah masih diambil dari sudut pandang kedua bangsa tersebut. Dengan dilakukannya penanaman nilai-nilai pancasila secara pasif terhadap diharapkan bahwa masyarakat Indonesia secara luas dapat memiliki pemahaman yang lebih terarah, dan mampu menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk dari budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A. (2021). Pancasila, Pendidikan dan Indoktrinasi. *Koran Sindo*. <https://nasional.sindonews.com/read/335992/18/pancasila-pendidikan-dan-indoktrinasi-1613390533>
- Andriyani, D. (2023). *Indoktrinasi Pendidikan pada Masa Orde Lama*. Kumparan. <https://kumparan.com/dyna-andriyani/indoktrinasi-pendidikan-pada-masa-orde-lama-207XrvYjFaN>
- Asri, M. (2017). Dinamika Kurikulum Di Indonesia. *Modelling: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2), 192–202.
- Ekajati, E. S., Tiarsyah, I., Saputra, Sobana, H., & Eman, S. (1998). *Sejarah pendidikan daerah Jawa Barat*. Depdikbud. <http://pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id/index.ph...>
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2016). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966) Pendahuluan Sistem Pendidikan Indonesia Masa Orde Lama. *Agastya*, 9, 157–171.
- Gunawan, A. H. (1986). *Kebijakan kebijakan pendidikan di Indonesia (I)*. Bina Aksara.
- H.A.R, T. (2003). *Kekuasaan dan pendidikan: suatu tinjauan dari perspektif studi kultural*. Magelang.
- Hartono, Y. (2016). PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN POLITIK (KAJIAN REFORMASI PENDIDIKAN DI INDONESIA MASA ORDE LAMA HINGGA REFORMASI) Yudi. *AGASTYA*, 6(1), 35–45.
- Hartono, Y. (2017). Model Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Bangsa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7(01), 34–48. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v7i01.1059>
- Kartodirjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam metodologi sejarah* (S. Pusposaputro (ed.)). Gramedia Pustaka.
- Kurnia, H., & Hudaidah, H. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945 – 1966). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 839–846. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/448>
- Lingga, W. (2017). NASAKOM SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA TAHUN 1959-1965,. *Journal Pendidikan Sejarah*, 5(3).

- Palupi, S. (2018). Dinamika Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Pada Tahun 1945-1965. *Risalah*, 5(5), 525–536.
- Rozak, A. (2022). *Pengertian Indoktrinasi Politik, Ciri, dan Contohnya*. DosenPpkn.Com. <https://dosenppkn.com/pengertian-indoktrinasi-politik/>
- Suriansyah, A. (2011). Landasan Pendidikan. In J. Dalle & Z. Jamalie (Eds.), *Comdes*. Comdes. [http://idr.uin-antasari.ac.id/6633/1/Buku Landasan Pendidikan.pdf](http://idr.uin-antasari.ac.id/6633/1/Buku_Landasan_Pendidikan.pdf)
- Thabroni, G. (2022). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)*. Serupa.Id. <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>
- Umasih. (2017). Memahami Pengembangan Kurikulum Sejarah Pada Masa Orde Baru. In *sejarah.upi.edu*. <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/memahami-pengembangan-kurikulum-sejarah-pada-masa-orde-baru/>
- Wadirman, D. (1996). *Lima puluh tahun perkembangan pendidikan indonesia*. Depdikbud.